

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel seperti belanja pemerintah fungsi ekonomi, belanja pemerintah fungsi kesehatan, belanja pemerintah fungsi pendidikan, indeks pembangunan manusia (IPM), serta indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IPTIK), memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI) di 34 provinsi di Indonesia. Berikut adalah kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis:

- a. Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, peningkatan alokasi anggaran pada fungsi ekonomi tidak secara otomatis mendorong pembangunan yang inklusif apabila tidak difokuskan pada perluasan kapabilitas masyarakat. Hal ini terjadi karena belanja pemerintah di sektor ekonomi kerap kali belum menyentuh akar permasalahan ketimpangan. Oleh sebab itu, untuk memastikan agar belanja sektor ekonomi memberikan dampak nyata terhadap pembangunan inklusif, dibutuhkan reformasi dalam proses perencanaan, pengawasan anggaran, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program.
- b. Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dalam jangka pendek, namun tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. Hasil ini sejalan dengan teori Kapabilitas Manusia yang menekankan pentingnya kesehatan dalam meningkatkan produktivitas dan partisipasi ekonomi. Belanja di sektor kesehatan terbukti menjadi bentuk investasi strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif. Namun, apabila dilakukan secara berlebihan dalam jangka panjang, pengeluaran ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara besaran, efektivitas, dan

- efisiensi belanja kesehatan agar tetap memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- c. Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dalam jangka pendek, meskipun tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan Teori Kapabilitas Manusia yang menekankan pentingnya pendidikan dalam memperluas pilihan hidup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran signifikan belanja pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif di tingkat daerah mengindikasikan bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk masyarakat yang produktif dan kompetitif. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan merupakan langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata.
 - d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dalam jangka panjang, meskipun tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek. Temuan ini sejalan dengan Teori Modal Manusia yang menekankan bahwa investasi pada aspek-aspek seperti pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas individu dalam berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi yang inklusif. Hal ini menjadikan IPM sebagai elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan manusia sepatutnya dijadikan fondasi utama dalam membangun perekonomian yang inklusif dan resilien.
 - e. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, meskipun tidak ditemukan hubungan kausalitas antara keduanya. Temuan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mengingat masih adanya ketimpangan

akses dan rendahnya tingkat literasi digital di berbagai wilayah. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang siap, perkembangan teknologi justru berisiko memperdalam kesenjangan. Oleh karena itu, penguatan IPTIK perlu disertai dengan upaya peningkatan kapasitas digital masyarakat agar transformasi digital benar-benar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan merata.

V.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

V.2.1 Saran Teoritis

- a. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, partisipasi angkatan kerja, akses layanan keuangan, kualitas tata kelola pemerintahan, serta variabel lingkungan hidup dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
- b. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan periode waktu. Dengan menganalisis data hingga tingkat kabupaten/kota atau memperpanjang periode pengamatan, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika inklusivitas ekonomi antarwilayah dan tren jangka panjang dari dampak belanja pemerintah serta pembangunan manusia dan teknologi terhadap IPEI.

V.2.2 Saran Praktis

- a. Optimalisasi Belanja Pemerintah dalam Fungsi Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa realisasi anggaran pada fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan berjalan secara tepat sasaran dan efisien. Alokasi anggaran sebaiknya difokuskan pada program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketimpangan, dan

perluasan akses terhadap layanan dasar agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

- b. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan IPM. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal. Hal ini penting untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan partisipatif.
- c. Perluasan Akses dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan meningkatkan literasi TIK di seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan IPTIK akan mendorong inklusi digital dan membuka lebih banyak peluang ekonomi, khususnya bagi kelompok marjinal, pelaku UMKM, dan masyarakat di daerah terpencil.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih terarah pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.